

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
PARA PIHAK DALAM GADAI TANAH
(Studi tentang Adat Kebiasaan Masyarakat di Dusun Bendungan,
Desa Simbarejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo)

Gadai tanah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang dari sertipikat yang dijamin kepada yang hingga kini masih dilakukan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Bendungan, Desa Simbarejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Proses gadai tanah yang terjadi melibatkan pemberi gadai dan pemegang gadai yang memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang mengatur gadai tanah.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa sertipikat hak atas tanah dapat dijamin dalam bentuk gadai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi dan pemegang hak gadai atas tanah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sertipikat hak atas tanah dapat dijamin dalam bentuk gadai dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi dan pemegang hak gadai atas tanah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara langsung secara bebas dan terbuka kepada subjek yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian, teknik analisis secara kualitatif dengan penarikan simpulan secara induktif.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat desa melakukan gadai tanah adalah karena kebutuhan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Perlindungan hukum kepada para pihak masih lemah karena belum adanya aturan hukum yang pasti.

Disarankan kepada masyarakat desa bendungan untuk melibatkan Notaris dalam melakukan perbuatan hukum supaya dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat memiliki bukti otentik dan memiliki kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir sengketa dikemudian hari.

Kata kunci : gadai tanah, adat kebiasaan, perlindungan hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE PARTIES POSITION IN LAND PAWN
(Study of the Indigenous People in Bendungan-Simbarejo Village,
District Selomerto, Wonosobo)

Pawn is a relationship between a person's land with land owned by others who have received money from the certificates pledged to him that still continues to be and has become a habit of society Bendungan-Simbarejo Village, District Selomerto, Wonosobo. The process involves a pledge of land affected by the pledgor and the pledge holder who has a different position, so that the necessary legal certainty that regulate in land pawn.

This study examines why the certificate of land can be guaranteed in the form of liens and how the legal protection of the giver and the holder of a lien on the land that aims to identify the factors that cause the certificate of land rights can be guaranteed in the form of a pledge and to identify and analyze the legal protection against giver and lien holders on the ground.

This study was conducted using empirical juridical approach, research specifications with descriptive analysis, type of data used are primary data and secondary data, obtained through field studies in the form of direct interviews are free and open to the subjects that are closely related to the problems in the research, analysis techniques qualitatively with inductive inference.

The results of this study is that the factors that led to the village community did pledge of land is due to the needs of society and the lack of public knowledge about the law. Legal protection to the parties are still weak because there is no definite rule of law.

Suggested to Bendungan villagers to involve Notary Public in legal actions that in any legal actions undertaken by the community to have an authentic proof and possess the legal certainty so as to minimize disputes.

Keywords: *pawn lands, customs, legal protection.*